

Kontribusi Cendekiawan Muslim Lokal Bagi Pembangunan Pendidikan Indonesia

Mustari Bosra 

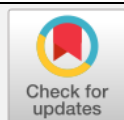
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 90222, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

Korespondensi: mustalibosra@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Bosra, M. (2022). The Contribution of Local Muslim Scholars to the Development of Indonesia's Education. *Society*, 10(2), 452-465.

DOI: [10.33019/society.v10i2.481](https://doi.org/10.33019/society.v10i2.481)

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 22 September, 2022;

Diterima: 16 Desember, 2022;

Dipublikasi: 30 Desember, 2022;

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hal yang krusial dalam setiap kebudayaan dan peradaban. Dengan pendidikan, umat manusia dapat mengubah diri dan peradabannya. Begitu pula dengan proses penyebaran Islam di Indonesia. Sejak Islam pertama kali masuk di Indonesia, penyebarannya tidak terlepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk pembangunan dan pembentukan sektor pendidikan (Rochmawati et al., 2018; Vickers, 2013; Hasan, 2009). Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah Indonesia dengan sejarah pendidikan Islam yang lebih luas (Ricklefs, 2012; Woodward, 2010). Dalam manuskrip ini, penulis mengkaji kontribusi cendekiawan Muslim dalam mengembangkan pendidikan modern di Indonesia. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Metode mediator dan agen sosial telah digunakan untuk memfasilitasi penyelidikan. Penulis melakukan kajian struktural yang merekonstruksi peristiwa dan kejadian sejarah terkait perkembangan dan transformasi pendidikan di tanah air. Temuan penelitian ini didasarkan pada pertanyaan, "Apa kontribusi Cendekiawan Muslim dalam perkembangan pendidikan modern Indonesia, dan bagaimana proses pendidikan di Pulau Jawa? Pertanyaan ini meletakkan dasar untuk penelitian ini, dan membantu untuk memahami fungsi cendekiawan Muslim lokal dalam perkembangan pendidikan antara abad ke-19 dan ke-20 di kepulauan Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa karakteristik gerakan cendekiawan Muslim tentang pendidikan di Pulau Jawa terutama terdiri dari dua tahap. Pertama, pendidikan dilakukan di masjid-masjid, yang kemudian berkembang menjadi sekolah Islam yang digolongkan menjadi madrasah dan pesantren (Azra, 2018). Pada tahap kedua, upaya pendidikan diubah dari bentuknya sekolah Islam

menjadi organisasi Islam, mengarah pada pendirian beberapa lembaga pendidikan dan sekolah umum, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi (Daulay & Tobroni, 2017; Azra, 2015). Akhirnya disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia berkembang secara bertahap, mulai dari pendidikan di masjid-masjid dan pertemuan-pertemuan kecil di rumah-rumah para cendekiawan muslim hingga sekolah-sekolah Islam. Akhirnya, organisasi Islam dibentuk untuk mengembangkan sistem pendidikan masyarakat saat ini.

Kata Kunci: Cendekiawan Muslim; Nilai Lokal; Pendidikan; Pendidikan Islam; Perkembangan Pendidikan Sejarah

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari pendidikan; oleh karena itu manusia membutuhkan pendidikan untuk mempertajam dan mengembangkan berbagai potensi dirinya (Gardner, 1990; Havighurst, 1953). Selanjutnya, pendidikan diperlukan untuk membangun peradaban (Butts, 1967). Dengan kemajuan teknologinya, Jepang menjadi negara maju karena pendidikan. Kemerdekaan bangsa Indonesia juga dimulai dari pendidikan (Okano, 2010). Keyakinan bahwa kekuatan kolonial Belanda tidak memiliki etika kemanusiaan secara politis membuat masyarakat Indonesia menyadari posisi mereka yang terjajah, yang berujung pada persatuan dalam memperjuangkan pemerintahan yang merdeka (Steenbrink, 2006; Schmutzer, 1977). Ini karena gerakan Islam di seluruh nusantara (Asiah *et al.*, 2022; Steenbrink, 2006).

Soekarno, salah satu bapak bangsa dan orator ulung, menghabiskan masa mudanya dengan mengenyam pendidikan baik di lembaga formal maupun informal. Pendidikannya memperluas wawasannya dan meningkatkan potensinya untuk memotivasi masyarakat Indonesia (Ghofar, 2018).

Proses pendidikan dapat disampaikan melalui lembaga formal maupun informal. Di Indonesia, pendidikan telah diberikan kepada masyarakat jauh sebelum pemerintah kolonial menerapkan politik etika. Namun, jenis pendidikan pada masa itu hanya menyangkut ilmu agama (Islam). Guru-gurunya kebanyakan cendekiawan Muslim. Proses pendidikan pada waktu itu tidak dilembagakan; beberapa bentuk pendidikan informal disampaikan di masjid atau rumah cendekiawan Muslim. Muatan pendidikan terdiri dari ilmu-ilmu keislaman umum, meliputi akhlak, aqidah, membaca dan menulis Al Quran, dan sebagainya. Tujuan dari proses pendidikan adalah untuk menghasilkan cendekiawan Muslim masa depan. Cendekiawan muslim merupakan kelompok elit umat Islam yang berperan penting dalam menentukan gerak masyarakat muslim dalam mengejar pembangunan. Mereka adalah pelindung perkembangan perilaku Muslim. Semua Muslim harus bertindak dan berperilaku sesuai dengan bimbingan cendekiawan Muslim (Mulkhan, 1994). Oleh karena itu, pendidikan tradisional di Indonesia sangat bergantung dan dipengaruhi oleh para cendekiawan Muslim.

Mansurnoor (1995), dalam kajiannya tentang cendekiawan Muslim di Madura, menggambarkan cendekiawan Muslim di desa-desa kecil sebagai pemimpin lokal yang sebenarnya. Dengan karisma dan sikap berwibawa mereka, cendekiawan Muslim dapat mengalahkan pemimpin lokal lainnya (Formichi, 2012). Sebagai pemimpin lokal sejati, eksistensi kepemimpinannya telah teruji dan dibuktikan dalam berbagai peristiwa sejarah. Para cendekiawan Muslim yang jumlahnya tidak terlalu besar menjadi sumber kepercayaan dan

motivasi umat. Cendekiawan Muslim berpengetahuan luas; orang datang kepada mereka untuk bertanya tentang masalah agama dan sosial (Lev, 1972). Ritual keagamaan, dan bentuk ritual lainnya, tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran mereka. Mengingat pentingnya peran cendekiawan Muslim dalam masyarakat, wajar jika mereka juga mempengaruhi pendidikan. Pendidikan adalah cara mereka untuk menghasilkan cendekiawan Muslim masa depan.

Pendidikan Islam—menanamkan nilai-nilai Islam—telah dimulai sejak agama ini diperkenalkan di Sulawesi Selatan. Di bawah perlindungan raja-raja yang telah mengubah kerajaan mereka menjadi kerajaan Islam, para cendekiawan dan mubaligh Islam menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Kemudian, orang-orang yang telah menerima dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupannya menyebarkannya kepada orang lain, seperti yang diimbau oleh Hadits “*ballighu ‘anniy walaw ayatan*” (Sampaikanlah dariku meski hanya satu ayat).

Untuk dapat mengelola pendidikan dan pembangunan umat, beberapa cendekiawan Muslim yang menduduki posisi dalam struktur pemerintahan harus melepaskan jabatan tersebut. Sebagian alasannya adalah bahwa para cendekiawan Muslim merasa lebih mudah bergerak secara mandiri jika mereka bukan bagian dari struktur pemerintahan formal. Laporan ini bertujuan untuk mengembangkan teori yang mengacu pada Teori Ketidakadilan Barrington Moore, sebagaimana dikutip dalam Abdullah (1995). Menurut Moore, “Ada saatnya anggota masyarakat menunjukkan kepatuhan mereka pada otoritas, tetapi ada juga saat mereka melawannya.” Mereka mungkin menentang otoritas. Moore menjelaskan hal ini dengan menggunakan konsep ketidakadilan. Dia menggambarkan tiga kelompok ketidakadilan: otoritas, beban kerja, dan distribusi barang dan jasa. Penyimpangan apa pun dalam ketiga kelompok ini menunjukkan ketidakadilan (Abdullah, 1995, p. 48).

Cendekiawan Muslim, sebagai anggota masyarakat, menampilkan apa yang dijelaskan Moore dalam teorinya; terkadang, mereka mematuhi otoritas, dan yang lainnya menentangnya. Mengapa itu terjadi? Secara konseptual, hal ini sejalan dengan konsep jihad dan *amar ma’ruf nahi munkar* dalam Islam. Jihad berarti berperang untuk menegakkan jalan Allah, sedangkan *amar ma’ruf nahi munkar* adalah konsep mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan maksiat. Setiap kali terjadi sesuatu dalam masyarakat, yang termasuk dalam kategori hal-hal *munkar* (maksiat), cendekiawan Muslim akan melawannya; seperti yang diperintahkan Nabi Muhammad, “Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, apabila tidak sanggup, (rubahlah) dengan lisannya, apabila tidak sanggup, (rubahlah) dengan hatinya, yang demikian adalah lemah-lemah keimanan” (Hadis).

Sistem pendidikan Islam tradisional sudah lama diterapkan di Nusantara (Indonesia), termasuk Sulawesi Selatan. Sistem pendidikan di Sulawesi Selatan tidak banyak berubah sejak awal abad ke-17. Sistem itu disebut *mangngaji tudang*. Secara umum sistem pendidikan *mangngaji tudang* terbagi menjadi dua; *mangngaji korang* dan *mangngaji kitta*. *Mangngaji korang* selanjutnya dikategorikan menjadi tiga tingkatan: *angngijja*, *ammaca lambusu*, dan *assarak baca*.

Dalam perkembangannya, banyak lembaga pendidikan *mangngaji kitta* berkembang menjadi madrasah yang beroperasi dengan sistem pembelajaran klasikal, dengan menggunakan gedung, ruang kelas, kurikulum, dan aturan formal lainnya. Misalnya, lembaga yang dirintis oleh Haji As’ad berkembang menjadi Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang. Selain lembaga yang terus berkembang ini, beberapa lembaga telah didirikan sebagai madrasah sejak awal; misalnya Madrasah Amiriyah Bone dan Madrasah Islahuddin Jongaya-Gowa.

Pentingnya cendekiawan Muslim dalam pendidikan telah terbukti di Sulawesi Selatan (Harvey, 1974). Masyarakat Sulawesi Selatan telah mengakui pentingnya cendekiawan Muslim sejak abad ke-15. Perjuangan mereka menghasilkan konversi masyarakat menjadi kerajaan Islam. Perubahan struktur masyarakat dan kerajaan sangat erat kaitannya dengan pendidikan yang diberikan oleh para cendekiawan Muslim. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji pergerakan cendekiawan Muslim tradisional dalam pendidikan, dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana ciri-ciri pergerakan cendekiawan Muslim tradisional dalam pendidikan?

Kajian ini bertujuan untuk merekonstruksi pola pendidikan yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh cendekiawan Muslim tradisional dalam membentuk budaya masyarakatnya. Secara sosiologis, berdasarkan disiplin ilmu agama yang diyakini masyarakat; Umat Islam di Indonesia telah diklasifikasikan menjadi dua kelompok, tradisional dan modernis, sejak abad ke-20 (Noer, 1980). Di Sumatera, kelompok ini disebut 'kaum tua' dan 'kaum muda' (Abdullah, 1970). Kalangan tradisional (kaum tua) umumnya diidentifikasi sebagai umat Islam yang sangat mendukung pemikiran para pemikir Islam sebelumnya, khususnya mereka yang hidup pada periode Islam klasik (Dhofier, 1982). Mengenai fikih, sebagian besar tradisional percaya pada disiplin Syafi'i, disiplin Islam yang dikembangkan oleh Abdullah Muhammad Ibnu Idris As-Syafi'i (767-820). Sedangkan kaum muslimin modernis telah memisahkan diri dari pemikiran lama para cendekiawan Muslim sebelumnya. Kelompok ini mengeksplorasi dan mengkaji ajaran Islam secara bebas dan rasional dari sumber agama yang sebenarnya, yaitu Al Qur'an dan Hadits, bukan mengikuti tafsir para cendekiawan lama (Nasution, 1983).

Cendekiawan Muslim yang diteliti dalam penelitian ini adalah kaum tradisional, meskipun beberapa dari mereka masih aktif pada tahun 1940-an. Sebab, konsep tradisional dan modern tidak diukur berdasarkan waktu, melainkan pada pola pikir dan kerangka pemikiran para cendekiawan Muslim.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan suatu peristiwa sejarah yang terjadi dalam suatu periode, dengan menitikberatkan pada tokoh-tokoh yang terlibat atau perubahan lingkungan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif terstruktur. Secara teori, pendekatan ini memandang individu atau masyarakat berdasarkan posisi dan peran sosial, fungsinya, serta pemikiran dan nilai-nilai yang mengatur kehidupannya (Lloyd, 1993). Hasil penelitian ini mengungkap rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau, seperti yang ditemukan oleh peneliti.

Pentingnya cendekiawan Muslim dalam kehidupan sosial pada masa itu menempatkan mereka pada posisi dan status yang relatif tinggi dalam sistem sosial atau kerajaan. Konsep mediator diterapkan untuk menilai pentingnya posisi mereka dalam masyarakat. Menurut Hirokoshi (1987), konsep mediator berguna untuk menganalisis perubahan masyarakat. Perubahan yang dimaksud di sini adalah yang digerakkan atau disebabkan oleh pihak tertentu, dalam hal ini cendekiawan Muslim tradisional.

Peran mediator dipegang oleh individu atau kelompok yang menghubungkan atau menengahi suatu masyarakat dengan sistem masyarakat yang lebih luas. Dalam kajian ini, peran mediator dipegang oleh para cendekiawan Muslim tradisional; masyarakat yang terhubung dengan sistem yang lebih luas adalah masyarakat Islam tradisional tempat mereka bekerja.

Selain ide mediator, studi ini menggunakan konsep agen sosial Llyod (Llyod, 1993). Selalu ada agen sosial dalam masyarakat, yang didefinisikan sebagai orang atau kelompok otonom yang ada di dalam dan menjadi milik masyarakat dan memiliki kekuatan, otoritas, dan pengaruh untuk bertindak sebagai agen yang mengatur dan mengendalikan perubahan dalam masyarakat itu.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Keduanya akan digunakan dalam analisis, tetapi alokasinya akan berbeda. Data primer digunakan untuk analisis dan pembahasan yang terkait erat dan terfokus untuk menjawab permasalahan penelitian. Penting untuk ditekankan bahwa meskipun data primer dari sumber tertulis tidak mencukupi, data primer dari sumber lisan (wawancara) juga akan digunakan.

Data primer tertulis diperoleh dari karya-karya cendekiawan muslim tradisional berupa buku, ceramah, catatan, brosur, dan lain-lain; dokumen organisasi, seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, resolusi dewan, risalah rapat dan resolusi, laporan; korespondensi resmi antar organisasi, keputusan hukum; dokumentasi lain yang berasal dari luar yang berkaitan dengan organisasi, laporan atau komunikasi pemerintah dan sektoral, dan media massa. Data juga bersumber dari Arsip Nasional Makassar, terutama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan situasi sosial politik pada masa kolonial.

Wawancara juga dilakukan dengan lebih dari 50 responden, termasuk cendekiawan Muslim, pegawai negeri sipil, dan orang lain yang terlibat langsung atau menyaksikan peristiwa sejarah yang diteliti. Sebagai hasil dari kajian metodologi sosiologi dan antropologi serta untuk melengkapi bahan sumber tertulis dan lisan, dilakukan observasi partisipatif melalui sosialisasi dengan civitas akademika muslim dan kunjungan ke berbagai tempat.

Studi ini juga menggunakan sumber data sekunder dari literatur yang diterbitkan oleh para peneliti, akademisi dan praktisi di lapangan. Perlu dicatat bahwa sumber primer dan sekunder telah dikritik secara internal dan eksternal, seperti yang biasa terjadi dalam proses pemilihan data sejarah.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan organisasi Islam di Indonesia identik dengan pengaruh pendidikan. Dari masjid ke masjid, pendidikan Islam berujung pada lahirnya organisasi-organisasi Islam dengan orang-orang bermotivasi tinggi yang selalu memperjuangkan aspirasinya. Misalnya, Soekarno belajar dari seorang guru, HOS. Tjokroaminoto. Keduanya menjadi orang penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Di Sulawesi Selatan, pendidikan Islam telah dimulai sejak Islam pertama kali diperkenalkan di daerah tersebut. Puluhan dan ratusan orang telah pergi ke Mekkah untuk melanjutkan pendidikan dan menambah pengetahuan mereka sebelumnya. Proses pendidikan di Sulawesi Selatan pada mulanya merupakan bentuk pendidikan yang disampaikan di masjid atau rumah tinggal guru (cendekiawan Muslim). Pendidikan menjadi lebih terstruktur dan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang memadai seiring dengan perubahan zaman. Pada bagian ini peneliti memaparkan tahapan-tahapan perubahan pendidikan di Sulawesi Selatan abad ke-19.

3.1. Tahap 1: dari Masjid ke Madrasah

Dari sekian banyak daerah di Sulawesi Selatan, Salemo memiliki tempat khusus di hati ratusan cendekiawan Muslim tradisional Sulawesi Selatan yang pernah belajar di sana. Antara tahun 1910 dan 1940, Salemo merupakan pusat pendidikan Islam tradisional terbesar di Sulawesi Selatan. Sekitar 20 cendekiawan Muslim tradisional, kebanyakan guru mangngaji

kita, tinggal di daerah tersebut. Ratusan mahasiswa mengunjungi mereka dari daerah Sulawesi Selatan dan daerah lainnya.

Cendekiawan Muslim paling senior, Gurutta Abdul Hamid, ditemuinya saat pertama kali datang ke Pulau Salemo, Gurutta Haji Abdul Rahim, yang lebih dikenal dengan Puang Walli. Abdul Hamid memperkirakan Puang Walli saat itu berusia 60 tahun. Dia meninggal pada tahun 1928 pada usia sekitar 70 tahun. Puang Walli adalah orang Bugis-Makassar, lahir di Tanete Barru. Pada usia 25 tahun, ia meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar Islam. Setelah tinggal dan belajar di sana selama sekitar 20 tahun, dia kembali ke rumah. Setibanya di Sulawesi, ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan dan mengajarkan Islam. Salah satu tempat yang sering ia kunjungi adalah Pulau Salemo. Di sanalah ia bertemu dengan saudagar besar, Haji Rapping Daeng Nye're.

Karena penyebaran Islam pada masa awal tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, maka perkembangan Islam pada masa berikutnya juga sangat dipengaruhi oleh perekonomian. Pada akhir abad ke-19, perdagangan antar pulau di kepulauan Indonesia membaik. Komoditas pertanian Sulawesi Selatan seperti beras, kopra, dan biji kopi diterima pasar yang lebih luas. Lebih banyak uang diedarkan. Di sisi lain, produk impor lebih banyak mendapat perhatian dan permintaan dari masyarakat lokal. Dalam kondisi ini, masyarakat Pulau Salemo, nelayan atau pedagang hasil laut, berhasil meningkatkan kesejahteraannya. Karena letak Pulau Salemo yang strategis, semakin banyak orang yang berkunjung dan tinggal di sana dari waktu ke waktu. Kebanyakan dari mereka adalah pedagang dan saudagar. Diprakarsai oleh Haji Rapping Daeng Nye're, para pedagang dan saudagar ini memperluas dan memperbaiki Masjid Agung Pulau Salemo.

Setelah Masjid Agung selesai direnovasi, Daeng Nye're dan rekan-rekannya selalu mengundang cendekiawan muslim dari daerah lain untuk berkunjung. Salah satunya adalah Haji Abdul Rahim, seorang cendekiawan muda Muslim. Daeng Nye're kemudian menggandeng Haji Abdul Rahim sebagai menantunya, dengan harapan bisa mengembangkan dan memajukan pendidikan Islam di daerah tersebut. Perkawinan antara Gurutta Haji Abdul Rahim dengan putri Daeng Nye're dilangsungkan, setelah itu Haji Abdul Rahim tinggal di Pulau Salemo. Ia sering dikunjungi oleh para cendekiawan Muslim tradisional yang ingin belajar di bawah bimbingannya. Karena setiap cendekiawan Muslim yang berkunjung ke pulau itu membawa siswa dan muridnya, Pulau Salemo dipenuhi guru dan murid *mangngaji kitta*.

Seiring berkembangnya *mangngaji kitta* di Salemo, perekonomian pun ikut membaik. Para saudagar dan pedagang asal Sulawesi Selatan yang merasa tidak aman tinggal di tempatnya karena menentang pemerintah kolonial Belanda, memilih tinggal di Pulau Salemo. Dukungan dari orang-orang ini mengembangkan *mangngaji kitta* lebih jauh lagi.

Terlepas dari segala keberhasilan yang telah diraih, penyebaran dan perkembangan Islam di Salemo tidak dapat bertahan lama. Suatu hari, di awal tahun 1944, Pulau Salemo dibom udara oleh Pasukan Sekutu. Pulau itu terbakar. Masjid Agung Salemo dan bangunan lainnya hancur dilalap api. Tidak ada satu rumah pun yang selamat; semuanya terbakar habis.

Setelah kejadian itu, para pelajar dan warga Salemo meninggalkan pulau tersebut. Penduduk setempat yang telah tinggal di Salemo sepanjang hidup mereka pindah ke pulau-pulau lain di sekitarnya. Para santri Masjid Agung Salemo kembali ke tanah air atau pergi ke tempat lain untuk menyebarkan Islam. Inilah akhir dari *mangngaji kitta* di Pulau Salemo.

Namun, berakhirnya *mangngaji kitta* bukan berarti berakhirnya kegiatan pendidikan Islam. Beberapa guru yang pindah ke tempat lain masih melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, banyak siswa yang pernah belajar di Salemo membuka tempat menerapkan *mangngaji kitta* di

tanah airnya. Misalnya, Haji Abubakar Daeng Mappuji, yang pernah belajar di Salemo selama kurang lebih sepuluh tahun, memprakarsai *mangngaji kitta* di Tolok, Jeneponto, pada 1947. Murid-muridnya datang dari berbagai tempat, antara lain Jeneponto, Gowa, Bantaeng, dan Bulukumba. Belakangan, lulusan sekolah ini membangun sekolah Islam (madrasah) dan pesantren.

Di Bantaeng, Gurutta Haji Abdul Hamid, seorang cendekiawan Muslim tradisional yang juga belajar dan mengajar di Salemo; mengembangkan jaringan *mangngaji kitta* pada tahun 1950; berlokasi di Banyorang. Namun, tempat ini tidak berkembang seperti yang dibangun Abubakar di Jeneponto. Salah satu alasannya, Abdul Hamid tidak bisa fokus mengurus *mangngaji kitta*; terutama karena dia sering bepergian.

Di Makassar, dari tahun 1945 hingga 1970, beberapa cendekiawan Muslim dari Pulau Salemo memprakarsai *mangngaji kitta*, antara lain Gurutta Haji Muhammad Danial, Haji Bilalu, dan Haji Muhammad Nur. *Mangngaji kitta* yang diselenggarakan oleh Haji Muhammad Nur, berkembang menjadi sekolah Islam pada tahun 1953, memberikan pendidikan Islam untuk jenjang Ibtidaiyah (SD) hingga Aliyah (SMP).

Di wilayah Maros, Pangkajene Kepulauan, dan Barru, jaringan guru dan murid *mangngaji kitta* asal Salemo lebih banyak lagi. Hingga saat ini, masih banyak cendekiawan Muslim yang mengajarkan Al Quran dengan sistem *mangngaji kitta* yang dapat ditemui di tiga wilayah tersebut.

Daerah berikutnya yang bisa dianggap sebagai pusat pendidikan Islam di Sulawesi Selatan adalah Bantangeng. Babak baru pendidikan Islam dimulai di Bantaeng. Pada tahun 1946, salah satu cendekiawan Muslim yang merasa tidak aman untuk tetap tinggal di Arungkeke memutuskan untuk pindah ke Bantaeng. Namanya Haji Mukhsin atau Muhasing. Di Bantaeng, ia melanjutkan usaha yang digagas Haji Daeng untuk mengajarkan Al Qur'an dan ilmu-ilmu Islam. Pemodalnya, Makkatutu, adalah putra Haji Labundu, pemodal Haji Daeng, yang telah meninggal dunia pada tahun 1930-an.

Di Bantaeng, Haji Mukhsin, ketua Rabithul Cendekiawan Muslim wilayah selatan, sering berdiskusi dengan seorang Cendekiawan Muslim modernis, S. Majidi. Yang terakhir adalah Ketua Mualimin Muhammadiyah Bantaeng. Organisasi Muhammadiyah dari Jawa Timur mengutusnyanya pada tahun 1938 untuk menangani cabangnya di Bantaeng. Dari S. Majidi, Haji Mukhsin belajar tentang modernisme. Dengan prinsip tersebut, Haji Mukhsin kemudian menyempurnakan *mangngaji kitta* Haji Daeng di sekolah-sekolah Islam (madrasah), meliputi jenjang Ibtidaiyah (SD) dan Tsanawiyah (SMP). Siswa yang memenuhi persyaratan diterima di tingkat Tsanawiyah; sisanya diajarkan di tingkat Ibtidaiyah.

Karena Haji Mukhsin memiliki visi yang berorientasi ke masa depan, maka madrasahnyanya diberi nama Nahdatul Thawalib. Itu adalah kombinasi dari nama modernis dan tradisional. Kata "*Nahdlatul*" (*Nahdlatul*) diambil dari *Nahdlatul Ulama* (organisasi Islam terkemuka di Indonesia). Sekaligus nama sebuah lembaga pendidikan ternama di Padang Panjang, Sumatera. Thawalib, terinspirasi dari kata Thawalib. Pada tahun 1952, Qadhi Balanipa diangkat menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Bantaeng. Kiprah Gurutta Haji Mukasang dilanjutkan oleh Gurutta Haji Abu Thahir, Kali Balanipa yang telah berpengalaman mengelola pesantren di Sinjai sebelum menetap di Bantaeng.

Mandar adalah wilayah penting lainnya di mana cendekiawan Muslim mengembangkan pendidikan Islam. Awalnya, Mandar merupakan kerajaan otonom yang membuat perjanjian dengan Belanda. Perjanjian ini membatasi pergerakan Kerajaan Mandar. Pada tahun 1905, Kerajaan Mandar resmi takluk kepada Belanda dan berada di bawah kendali pemerintah kolonial. Dalam pembagian wilayah administratif Pemerintah Belanda, Mandar merupakan

salah satu dari enam daerah afdeeling di Sulawesi Selatan. Seperti masyarakat Islam lainnya di daerah lain, masyarakat Mandar tidak menerima pemerintah Belanda dengan baik. Meskipun mereka ingin melawan penjajah secara fisik, mereka tidak memiliki senjata dan kekuatan yang memadai. Kebanyakan orang Mandar hanya bisa menerima nasib mereka dan percaya pada rencana Tuhan.

Bagi orang awam, menerima nasib mereka dan beriman kepada Tuhan adalah final. Namun, bagi mereka yang dapat berpikir, yang memiliki hati nurani dan penglihatan, menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, bukanlah solusi. "Jika kita menerima segalanya begitu saja dan beriman kepada Tuhan tetapi tidak melakukan apa-apa, bagaimana kita bisa maju?" mereka berkata. Dalam Islam dikatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib masyarakat jika mereka tidak berusaha mengubahnya sendiri.

Cendekiawan Muslim Reformis adalah kelompok pertama yang menyadari fakta bahwa umat Islam belum berkembang dan perlu didorong maju. Kesadaran ini melahirkan Muhammadiyah cabang Majene pada tahun 1928. Melalui organisasi ini, para cendekiawan Muslim modernis membuka sekolah-sekolah Islam di Majene, Polewali, dan Wonomulyo.

Pembukaan sekolah Islam oleh cendekiawan Muslim modernis memotivasi cendekiawan Muslim tradisional untuk melakukan hal yang sama. Namun, mengingat pengetahuan dan latar belakang pendidikan mereka yang sangat terbatas, maka upaya para cendekiawan Muslim tradisional untuk mengembangkan pendidikan Islam memang bersifat tradisional. Sementara cendekiawan Muslim modernis menyelenggarakan sekolah-sekolah Islam (madrasah), kaum tradisional mengelola lembaga pendidikan *mangngaji kitta*. Antara tahun 1930 dan 1942, dua organisasi *mangngaji kitta* yang terkenal di Mandar berlokasi di Majene dan Campalagian.

Pendidikan yang disampaikan di Campalagian merupakan simbol perkembangan pendidikan Islam. Campalagian melahirkan banyak cendekiawan Muslim baru dan terus meningkatkan institusi pendidikan. Pendidikan Islam yang awalnya disampaikan di masjid dilembagakan. Institusi semacam itu bisa mengumpulkan ratusan mahasiswa dari berbagai tempat.

Haji Maddempungan adalah orang pertama yang menemukan lembaga pendidikan di Campalagian. Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim dari Bugis, lahir di Bilokka, Sidenreng Rappang. Untuk mengamalkan ilmunya, Haji Abdul Kadir, pamannya, membawanya ke Campalagian untuk menyebarkan Islam. Dalam prosesnya, Haji Maddempungan jatuh cinta dengan seorang gadis Campalagian, putri Haji Abdul Hamid, Kali dari Campalagian. Sejak pernikahannya dengan gadis itu, ia memutuskan untuk tinggal di Campalagian dan mengajarkan ilmu keislaman.

Di Campalagian, Haji Maddempungan membuka lembaga *mangngaji kitta*. Dengan dukungan ayah mertuanya, Haji Maddempungan berhasil mengembangkan lembaga pendidikannya dengan pesat. Seiring berkembangnya *mangngaji kitta*, Haji Maddempungan menjadi semakin terkenal. Saat ini, *mangngaji kitta* yang didirikan oleh Haji Maddempungan telah berubah menjadi Yayasan Perguruan Islam Campalagian.

Yayasan Perguruan Tinggi Islam Campalagian merupakan salah satu yayasan yang bekerja untuk mengembangkan kajian dan pengajaran Islam. Awalnya merupakan lembaga pendidikan nonformal yang beroperasi di bawah *mangngaji kitta*. Proses belajar mengajar dilakukan di rumah Haji Maddempungan. Hanya segelintir siswa yang belajar di sana pada tahun-tahun pertama perkembangannya yang ada di sana. Proses belajar mengajar biasanya dilakukan dengan sistem *halakah* (berputar-putar). Guru duduk di satu tempat, dan siswa yang datang lebih dulu duduk di sisi kanannya. Siswa berikutnya duduk di sebelah kanan siswa

pertama, begitu seterusnya sampai siswa terakhir duduk di sebelah kiri guru. Pada akhirnya, mereka semua akan duduk dalam lingkaran penuh.

Haji Maddempungan tidak membatasi usia dalam menerima mahasiswa. Dia akan menerima semua orang dan menempatkan mereka dalam kelompok berdasarkan tingkat membaca mereka. Proses pengajaran disampaikan dua kali sehari, dari pukul lima hingga sepuluh pagi dan sekitar pukul empat hingga enam sore. Lamanya pendidikan tidak dibatasi; seorang siswa dapat pergi kapan saja dan tinggal selama yang mereka inginkan tanpa harus membayar biaya apapun. Haji Maddempungan mengajar murid-muridnya karena ketaqwaannya kepada Allah. Ia bertujuan untuk menghasilkan cendekiawan Muslim yang bisa membaca dan menulis kitab gundul (buku-buku dalam huruf Arab, tetapi tanpa indikator bagaimana menyuarakan kata-kata). Ilmu dasar yang dia fokuskan adalah *Nahwu* dan *Sharaf*. Begitu seorang murid memahami dasar-dasar Nahwu dan Sharaf, dia akan diperbolehkan membaca buku-buku dengan kesulitan yang lebih besar (dalam hal kata dan isinya).

Pada jenjang yang lebih tinggi, Haji Maddempungan mengajarkan ilmu Tauhid, Fiqih, Tafsir, Falak, dan Tarikh Islam. Dari tahun 1930 sampai 1932, siswa lembaga ini adalah masyarakat setempat. Mereka menggunakan kitab-kitab warisan Pua Golombang. Pada tahun 1934, kegiatan belajar dipindahkan ke Masjid Agung untuk memfasilitasi jumlah siswa yang lebih banyak. Sistem pendidikan diperbaiki ketika Haji Abdul Hamid, yang telah belajar di Mekkah selama empat tahun, pulang dan pindah ke Campalagian. Selain Abdul Hamid, beberapa santri yang sejak awal belajar di bawah bimbingan Haji Maddempungan, seperti Muhammadiyah dan Abdul Halim, menjadi cukup mampu untuk mendampingi gurunya dalam mengajar santri baru.

Sejak itu, perkembangan baru di lembaga pendidikan Haji Maddempungan dimulai. Siswa yang berusia di bawah 15 tahun mulai diklasifikasi berdasarkan usia dan kompetensi. Hal ini menandai dimulainya penerapan sistem pendidikan klasikal di lembaga tersebut. Untuk tahap pertama, mereka membuka dua kelas untuk tingkat Ibtidaiyah; kelas satu untuk mereka yang belajar Islam dan Al Quran untuk pertama kalinya dan yang kedua untuk mereka yang memiliki pengetahuan dasar.

Dengan dibukanya sistem pendidikan madrasah, para santri di lembaga Haji Maddempungan belajar dengan dua sistem mangngaji kita; satu untuk mereka yang berusia di atas 15 tahun dan satu lagi untuk mereka yang berusia di bawah 15 tahun. Jumlah siswa terus bertambah. Bangunan sementara dengan dua ruang kelas tidak lagi memadai untuk memfasilitasi mereka. Maka, pada tahun 1926 dibangun gedung baru di atas tanah (panjang dan lebarnya kurang lebih 60 x 50 meter) yang disediakan oleh Kiai Haji Abdul Hamid.

Masa keemasan lembaga pendidikan Islam adalah tahun 1938-1954. Pendidikan berjalan lancar dan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan mantap, efisien, dan efektif di bawah bimbingan para guru yang bekerja atas nama Allah tanpa mengharapkan imbalan dunia. Guru-guru ini belajar kitab gundul di bawah bimbingan Kiyai Haji Maddempungan dari tahun 1930-1937.

Tahun demi tahun berlalu, madrasah Diniyah dengan sistem pendidikan klasikal dan pesantren dengan mangngaji kitta berjalan beriringan secara harmonis. Jumlah siswa terus meningkat, dan fasilitas ditingkatkan.

Namun, tidak ada manusia yang bisa menghindari nasibnya. Pada pertengahan tahun 1954, Kiyai Haji Muhammadiyah ditangkap dan ditangkap oleh sekelompok orang atas perintah Hasan La Kallu. Kiai Haji Muhammadiyah dan putra-putranya ditangkap di Pembijagi, kawasan Tutallu. Akibatnya, pendidikan di Madrasah Diniyah yang dipimpinnya terganggu, hingga terhenti sementara.

Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para pelopor lembaga pendidikan Islam. Mereka terus membenahi pesantren. Pendidikan Islam tidak lagi disampaikan di Masjid Agung; sebaliknya, itu dilakukan di rumah para cendekiawan Muslim, yang masing-masing mengajarkan satu mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran yang mereka ajarkan meliputi *Nahwu*, *Sharaf*, Fikih, Tafsir, Hadits, dan pengetahuan Islam lainnya. Dalam artian, pendidikan di rumah cendekiawan Muslim tidak berbeda dengan yang dilakukan di Masjid Agung karena lembaganya sama.

3.2. Tahap 2: dari Madrasah ke Organisasi Islam

Tahun 1928 merupakan tahun perubahan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, khususnya sistem pendidikan di Wajo. Gurutta Haji As'ad mengorganisir para cendekiawan Muslim yang mengikuti disiplin *ahlu sunnah wal jamaah* di wilayah Wajo untuk membentuk organisasi yang disebut '*Jamaah Tabligh*'. Namun, para cendekiawan Muslim yang bergabung dengan organisasi tersebut tidak memiliki pengalaman berorganisasi dalam pengertian modern. Untuk mengatasi situasi ini, Haji As'ad membuka lembaga *mangngaji kitta* di rumahnya untuk mendidik dan mengembangkan para cendekiawan Muslim yang kelak dapat menggantikannya dan meneruskan warisannya. *Mangngaji kitta* yang dirintis Haji As'ad nantinya akan dikembangkan menjadi Madrasah Arabia Islamiyah (MAI) Sengkang.

Pada tahun 1932, sebuah konferensi yang disebut 'Pertemoean Oelama Celebes Selatan' diadakan di Watampone, ibukota Selfbestuur Bone. Konferensi tersebut diprakarsai oleh Raja Bone, Andi Mappanyokki Sultan Ibrahim dan Kali of Bone, Gurutta Haji Abdullah Hamid. 26 cendekiawan Muslim dari seluruh daerah di Sulawesi Selatan menghadiri konferensi tersebut. Konferensi tersebut menghasilkan ide-ide untuk perbaikan, yang mengarah pada perkembangan gerakan cendekiawan Muslim tradisional dalam pendidikan. Gagasan tersebut, menurut Gurutta Haji Yusuf Muin (wawancara, 1999), dikemukakan oleh Gurutta Haji As'ad, cendekiawan muda Muslim yang menjadi bintang pertemuan tersebut.

Hasil "Pertemoean Oelama Celebes Selatan" dijelaskan secara rinci oleh Mattulada sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pendidikan Islam melalui sekolah-sekolah Islam (madrasah) dan melanjutkan kiprah cendekiawan muslim yang ada dalam sistem tradisional.
- 2) Madrasah harus menerima dana untuk pengembangannya dari zakat (hibah) umat.
- 3) Madrasah harus bebas dari pengaruh gerakan politik apapun dan tidak boleh lebih menekankan satu disiplin ilmu dari pada yang lain.
- 4) Madrasah berkembang bisa membuka cabang dimana saja, sesuai permintaan masyarakat sekitar.
- 5) Para cendekiawan Muslim harus menghindari perdebatan dan konflik di antara mereka sendiri" (Mattulada, 1983).

Sebagai realisasi dari gagasan yang disepakati dalam konferensi tersebut, Gurutta Haji As'ad segera mengubah *mangngaji kitta*-nya menjadi Madrasah Arabia Islamiyah (MAI) Sengkang pada tahun 1932.

Pada tahap perkembangan berikutnya, bermula dari penemuan MAI, berdirilah organisasi Islam pertama bernama Darud Dakwah wal Irsyad (DDI). Organisasi ini didirikan karena para cendekiawan Muslim khawatir dengan teror dan kekisruhan yang ditimbulkan penjajah Belanda di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Pembunuhan dan pembantaian orang, kebanyakan Muslim, terjadi di mana-mana. Orang Sulawesi Selatan pindah ke daerah lain yang lebih aman. Beberapa ulama pindah ke Watang Soppeng karena menganggap daerah

itu cukup aman. Pertemuan para cendekiawan Muslim tersebut merupakan kesempatan besar untuk membahas pendidikan. Mereka membahas masalah itu dengan dalih merayakan Maulid agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Musyawarah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 1947 (16 Rab'ul Awal 1366 H), diprakarsai oleh K.H Daud Ismail (Kadhi Soppeng), Syekh Abd. Rahman Firdaus dari Parepare, Kyai Haji Ambo Dalle dari Mangkoso, dan K.H. Muh. Abduh Pabbaja dari Allakuang Sidenreng Rappang. Dalam rapat tersebut dibahas bahwa perlu dibentuk organisasi yang bergerak tidak hanya di bidang pendidikan (seperti MAI). Organisasi juga harus berfungsi sebagai media untuk menyebarkan Islam dan pengetahuan sosial. Syekh Abdul Rahman Firdaus menyarankan untuk mengembangkan organisasi bernama Darud Dakwah wal Irsyad (DDI).

DDI yang berkantor pusat di Mangkoso tumbuh pesat. Banyak daerah yang meminta para pendiri untuk membuka cabang di daerahnya. Akibatnya, Kantor Pusat DDI sedikit kewalahan dengan sulitnya pengadaan dan penyediaan guru. Ketua Umum DDI akhirnya mengeluarkan kebijakan. Disepakati agar para siswa pada jenjang tertinggi mengajar di madrasah DDI di berbagai daerah. Mereka diharuskan untuk mengabdikan sebagai guru dan pendidik selama waktu tertentu sebelum mereka dapat melanjutkan studi.

Namun, masalah baru muncul. Mangkoso tidak lagi cukup untuk menangani semua aktivitas DDI yang baru dan sangat bervariasi. Sebagai pusat (markas) organisasi, Mangkoso menghadapi beberapa masalah, khususnya komunikasi dan transportasi. Mangkoso hanyalah kota kecamatan kecil, sedangkan DDI diharapkan menjadi organisasi tingkat nasional. Maka dipilihlah Pare-Pare untuk menggantikan Mangkoso sebagai pusat organisasi.

Dibawah pimpinan Gurutta Kyai Haji Muh. Faried Wadjedy, MA Pondok Pesantren DDI Mangkoso berbenah diri. Gurutta Kiai Haji Muh. Faried Wadjedy adalah salah satu cendekiawan Muslim yang lebih berani dalam menerapkan terobosan dan inovasi baru. Ilmu yang diperolehnya selama tinggal di Mangkoso, ilmu yang diperolehnya di Timur Tengah, dan pengalaman dari perjalanannya ke beberapa negara Eropa menjadi modal utama dan model utama untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam.

Saat pertama kali memimpin organisasi pada tahun 1985, masalah paling mendesak yang dirasakannya adalah perluasan kampus. Untuk itu, ia segera merencanakan program perluasan untuk membangun Kampus II dan Kampus III dengan tetap menjaga kualitas pesantren. Dia membuka tingkat I'dadiyah; itu adalah kelas persiapan satu tahun untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan para siswa sebelum mereka dapat belajar di institusi Mangkoso. Langkah ini berani dan berisiko sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan manajemen senior. Gurutta Faried Wadjedy meyakinkan anggota dewan manajemen lainnya bahwa hal ini diperlukan untuk mencegah siswa kewalahan oleh sistem pendidikan baru, di mana pengetahuan diberikan dalam bahasa Arab.

Pondok Pesantren DDI Mangkoso menyediakan pendidikan untuk semua jenjang, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Untuk lebih mengembangkan pesantren, banyak program yang telah disusun, meskipun realisasi program tersebut menghadapi banyak tantangan. Minimnya sarana dan dana menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan. Untuk menghimpun dana, pondok pesantren mengembangkan unit usaha. Lahan yang dihibahkan berupa sawah, perkebunan kecil, dan tambak dikelola dengan sangat baik. Ia juga bekerja di bidang lain, termasuk agribisnis, penerbitan, koperasi, dan bisnis lainnya.

Namun, semua ini tidak cukup. Kekuatan dan modal utama lembaga tersebut adalah jalan Gurutta Kiyai Haji Muh. Faried Wadjedy membangun dan memelihara hubungan baik dan

kemitraan dengan berbagai pihak. Hal ini memungkinkan institusi berakar pada 'komunitas akar rumput' dan didukung oleh 'otoritas puncak'.

Pendidikan Islam pada tahap terakhir ini dapat disamakan dengan konsep pesantren di Jawa. Seorang guru atau cendekiawan Muslim yang memberikan *mangngaji kitta* biasanya tinggal di dekat masjid, atau terkadang membangun masjid. Murid-murid datang kepadanya dan, untuk pendidikan mereka, tinggal di rumah guru atau rumah lain yang disumbangkan oleh orang-orang untuk tujuan itu. Guru pada umumnya hidup dari sumbangan masyarakat sekitar atau para siswa. Para siswa biasanya belajar siang dan malam agar kehidupan Islami terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pada satu titik, kebutuhan guru dan siswa terintegrasi. Pada titik ini, guru biasanya berkata kepada siswa:

"Ammantangmako Anrini Mappilajara anggaji, apa kujama apa todong nujama, apa kukanre apatodong nukanre, tangngareapa nutangngarea todong" (Datanglah bersamaku, dan pelajari Islam; kamu harus melakukan apa yang aku lakukan dan makan apa yang aku makan. Jika aku tidak punya apa-apa untuk dimakan; kamu juga tidak akan makan apa-apa).

Dari tahap pertama hingga keempat, *transfer* pengetahuan dilakukan dalam *setting* non formal non klasik. Tidak ada aturan dan media pengajaran. Hanya ada buku yang dimiliki guru dan siswa.

Para cendekiawan Muslim di Sulawesi Selatan menduduki posisi *parewa sarak*, status sosial yang setara dengan tangan kanan seorang raja. Keadaan berubah ketika pemerintah kolonial Belanda membuat perjanjian dengan Raja-raja Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan banyak cendekiawan Muslim melepaskan diri dari ikatan birokrasi dan membuka *mangngaji kitta*.

Pada tahun 1905, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan. Dalam waktu dua tahun (akhir tahun 1907), seluruh Kerajaan Sulawesi Selatan menyerah kepada Belanda. Semua kebijakan pemerintah kolonial diterapkan di daerah itu. Para cendekiawan Muslim yang tidak mau menyerah pada kekuasaan pemerintah memilih melarikan diri ke pulau lain yang lebih terpencil. Salah satunya adalah Pulau Salemo.

Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pendidikan Islam tradisional menjadi bervariasi. Berdasarkan penggagas lembaga tersebut, organisasi pendidikan Islam dikategorikan menjadi tiga macam. (1) Lembaga Pendidikan Islam yang diprakarsai oleh cendekiawan Muslim yang merdeka, tanpa ada kaitannya dengan otoritas birokrasi. Contoh lembaga semacam ini adalah *mangngaji kitta* yang dikembangkan oleh K.H. As'ad, yang kemudian berubah menjadi madrasah. (2) Lembaga Pendidikan Islam didirikan oleh *parewa sarak* bekerja sama dengan kerajaan setempat, yang kemudian dilembagakan. Contoh lembaga tersebut antara lain Madrasah Amiriyah Bone dan Madrasah Islamiyah Jongjaya. (3) Lembaga Pendidikan Islam yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim tradisional, dengan beberapa intervensi dari pemerintah, seperti di Salemo dan Majene.

Berbeda dengan institusi yang didirikan oleh kerajaan, institusi yang diprakarsai oleh para cendekiawan Muslim bertahan lama. Sementara itu, institusi yang berkembang di bawah pengaruh Kerajaan hanya berkembang pesat saat Kerajaan memiliki kekuatan. Namun, kedua jenis lembaga tersebut menghasilkan cendekiawan Muslim berkualitas tinggi. Lulusan lembaga ini diangkat menjadi staf Kantor Urusan Agama saat jurusan dibuka di Sulawesi Selatan.

Di Campalagian, pendidikan Islam telah berkembang pesat. Para santri yang dididik dari tahun 1930-1934 tersebut mampu membantu menyebarkan agama Islam dan memberikan informasi tentang agama kepada umat Islam di daerah Campalagian. Pada tahun 1934, institusi

Islam semakin berkembang. Ketika jumlah siswa meningkat pesat karena kedatangan siswa dari daerah lain, seperti Mangkoso, sistem baru dimulai. Para siswa diklasifikasikan berdasarkan usia dan kemampuan dalam sistem baru ini. Mereka yang berusia di bawah sepuluh tahun dialokasikan untuk belajar di bawah Haji Muhammadiyah, salah satu santri senior yang ditunjuk untuk mengajar. Karena banyak siswa yang berusia di bawah sepuluh tahun, dibangunlah gedung darurat. Luasnya hanya 12 x 15 meter, terdiri dari dua ruangan, dan dibangun dari sumbangan warga sekitar. Tanah tempat bangunan itu berdiri merupakan wakaf Haji Abdul Hamid yang terletak di antara jalan Muhammadiyah dan jalan Kiai Haji Abdul Hamid.

Santri lain yang berusia di atas sepuluh tahun mendapat akomodasi sederhana di rumah sumbangan di depan Masjid Agung Campalagian yang masih berdiri hingga sekarang.

4. Kesimpulan

Secara sosiologis, berdasarkan disiplin ilmu agama yang dianut oleh masyarakat, umat Islam di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, tradisional dan modernis. Pengkategorian tersebut tidak didasarkan pada lamanya pengabdian para cendekiawan Muslim terhadap umat, melainkan pada landasan disiplin mereka. Kalangan tradisional umumnya diidentikkan sebagai umat Islam yang sangat mengedepankan pemikiran para cendekiawan Muslim sebelumnya, terutama mereka yang pernah hidup pada periode Islam klasik. Sedangkan kaum muslimin modernis telah memisahkan diri dari pemikiran lama para cendekiawan Muslim sebelumnya. Kelompok ini mengeksplorasi dan mengkaji ajaran Islam secara bebas dan rasional dari sumber agama yang benar, yaitu Al Qur'an dan Hadits, bukan mengikuti tafsir para cendekiawan lama. Studi ini berfokus pada sarjana Muslim tradisional.

Perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan terbagi dalam dua periode yang berbeda. Periode pertama adalah peralihan dari pendidikan di masjid ke madrasah. Periode kedua adalah peralihan dari madrasah (sekolah Islam) ke organisasi Islam.

Pada periode pertama, pendidikan Islam dilakukan di masjid-masjid atau rumah tinggal para guru (cendekiawan Muslim). Materi yang mereka ajarkan masih sebatas membaca dan membaca Al Quran. Para siswa tidak diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam nilai dan kelas. Tidak peduli latar belakang dan kemampuannya, siapa pun yang ingin belajar akan belajar di bawah bimbingan seorang guru/cendekiawan Muslim.

Meski sederhana, beberapa pusat pendidikan dibentuk. Antara tahun 1910 dan 1940, pusat pendidikan Islam tradisional terbesar di Sulawesi Selatan terletak di Salemo. Sekitar 20 cendekiawan Muslim tradisional, yang menjadi guru mangngaji kitta, tinggal di daerah tersebut. Mereka memfasilitasi ratusan mahasiswa dari Sulawesi Selatan dan daerah lainnya. Madrasah Arabia Islamiyah (MAI) Sengkang merupakan madrasah pertama yang dibangun, dengan fasilitas pendidikan yang lebih baik, antara lain gedung dan konten yang lebih banyak seperti Fikih, *Nahwu*, Al Quran, dan Hadits.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

6. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1970). *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)*. Cornell University.
- Abdullah, T. (1995). *Islam dan Pluralisme di Asia Tenggara*, Jakarta, Indonesia: LIPI.
- Asiah, S., Huda, M., Amrin, A., Kharisma, R., Rosyada, D., & Nata, A. (2022, February). The Dynamics of Islam in Indonesia in the Perspective of Education. In *Proceedings of the 4th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies in conjunction with the 1st International Conference on Education, Science, Technology, Indonesian and Islamic Studies, ICIIS and ICESTIIS 2021, 20-21 October 2021, Jambi, Indonesia*.
- Azra, A. (2015). Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in the Modernization of Muslim Society. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 4(1), 85–114. <https://doi.org/10.31291/hn.v4i1.63>
- Azra, H. (2018). Islamic Education in Indonesia. In: Daun, H., Arjmand, R. (eds) *Handbook of Islamic Education. International Handbooks of Religion and Education*, vol 7. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64683-1_32
- Butts, R. F. (1967). Civilization-Building and the Modernization Process: A Framework for the Reinterpretation of the History of Education. *History of Education Quarterly*, 7(2), 147. <https://doi.org/10.2307/367558>
- Daulay, H. P., & Tobroni, T. (2017). Islamic education in Indonesia: A historical analysis of development and dynamics. *British Journal of Education*, 5(13), 109-126. Retrieved from <https://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Islamic-Education-in-Indonesia-A-Historical-Analysis-of-Development-and-Dynamics.pdf>
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. Jakarta, Indonesia: LP3ES.
- Formichi, C. (2012). *Islam and the making of the nation: Kartosuwiryo and political Islam in twentieth-century Indonesia* (p. 244). Leiden, Netherland: Brill Publishers.
- Gardner, H. (1990). *Art education and human development* (Vol. 3). Getty Publications.
- Ghofar, A. (2018). *Cohesion analysis of Soekarno's speech entitled only a nation with self reliance can become a great nation* (Doctoral dissertation). Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Harvey, B. S. (1974). *Tradition, Islam, and rebellion: South Sulawesi 1950-1965*. Cornell University.
- Hasan, N. (2009). The making of public Islam: piety, agency, and commodification on the landscape of the Indonesian public sphere. *Contemporary Islam*, 3(3), 229–250. <https://doi.org/10.1007/s11562-009-0096-9>
- Havighurst, R. J. (1953). *Human development and education*. Longmans, Green.
- Lev, D. S. (1972). *Islamic courts in Indonesia: A study in the political bases of legal institutions* (Vol. 12). Univ of California Press.
- Lloyd, C. (1993). *The structures of history*. Oxford: Blackwell.
- Mansurnoor, J. A. (1995). *Islam in an Indonesia World: Ulama of Madura*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mattulada, A. (1983). Islam di Sulawesi Selatan, dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Indonesia: Rajawali, p. 209-322.
- Mulkhan, A. M. (1994). *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi kebudayaan Dalam Islam*, Yogyakarta, Indonesia: Sipress.
- Nasution, S. (1983). *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung, Indonesia: Jammars.
- Noer, D. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*, Jakarta, Indonesia: LP3ES
- Okano, K. H. (2010). A cultural overview of education in Japanese civilization: Adaptive learning at the global periphery. In *Handbook of Asian education* (pp. 183-198). Routledge.

- Ricklefs, M. C. (2012). *Islamisation and its opponents in Java: A political, social, cultural and religious history, c. 1930 to the present*. Singapore: NUS Press.
- Rochmawati, E., Wiechula, R., & Cameron, K. (2018). Centrality of spirituality/religion in the culture of palliative care service in Indonesia: An ethnographic study. *Nursing & Health Sciences*, 20(2), 231–237. <https://doi.org/10.1111/nhs.12407>
- Schmutzer, E. J. (1977). *Dutch colonial policy and the search for identity in Indonesia: 1920-1931*. Brill Archive.
- Steenbrink, K. A. (2006). *Dutch colonialism and Indonesian Islam: contacts and conflicts, 1596-1950* (Vol. 7). Rodopi.
- Vickers, A. (2013). *A history of modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Woodward, M. (2010). *Java, Indonesia and Islam* (Vol. 3). Springer Science & Business Media.

Tentang Penulis

Mustari Bosra memperoleh gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2003. Penulis adalah Dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Indonesia.

Email: mustalibosra@gmail.com